



Menata Jogja dengan Menggusur

JOGJA, BERNAS - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta merobohkan perkiosan yang berada di selatan stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (5/7). Sebanyak 70 kios dirobohkan tanpa ada kompensasi kepada para pedagang.

Proses pembongkaran kios milik para pedagang itu dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Ratusan petugas dari PT KAI melakukan pembongkaran dan merobohkan seluruh bangunan kios yang ada. Sebelum merobohkan, para petugas tampak mengumpulkan dulu seluruh barang-barang berharga yang ada dalam kios-kios tersebut untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing pedagang.

Pembongkaran berjalan lancar, tanpa ada perlawanan apapun dari para pedagang. Mereka hanya berkumpul, duduk-duduk di tepian jalan seraya meratap kiosnya yang dirobohkan satu persatu.

Saat wartawan mengkonfirmasi para pedagang, mereka menyebutnya sebagai bentuk penggusuran paksa. Mereka juga mengaku tidak menerima dana kompensasi apapun dari PT KAI.

"Kami sudah sambat (mengadu) dengan dewan, dengan Pemkot, dengan orang Kraton, tapi semuanya tidak membawa solusi, nyatanya tetap digusur. KAI juga tidak memberikan kompensasi, tali asih apapun," ujar Sri Muryaningih, seorang pedagang setempat.

Sri mengatakan, kios yang dihuninya adalah resmi karena telah mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta. Selain itu ia juga mengantongi kekancingan hak guna tanah. "Kita setiap bulannya juga membayar piutang kepada keluarga HB VII pihak yang mengeluarkan surat kekancingan itu," katanya.

Ibu yang mengaku beranak dua itu mengaku kecewa dengan sikap KAI maupun pihak-pihak terkait yang tidak memberikan jalan keluar bagi para pedagang. "KAI katanya memikirkan kompensasinya, tapi nyatanya tidak ada. Sejak saya masih anak-anak, kios ini sudah ada. Kios ini saya dapat dari turun temurun orang tua, dari yang sebelumnya di kawasan THR lalu dipindah ke Senopati, lalu dipindah lagi di sini pada tahun 1970," katanya.

Pedagang lainnya, Nur Huda, juga hanya pasrah mengetahui kiosnya dirobohkan. Ia mengaku memiliki lima kios di tempat tersebut, salah satunya di kontrakkan. "Ada lima kios milik saya, semua saya tempat sendiri dengan keluarga. Hanya satu kios yang disewakan.

Sewanya Rp1,5 juta per bulan," katanya.

Huda juga mengaku tidak menerima kompensasi ganti rugi sepeserpun dari KAI. "Nggak ada kompensasi. Katanya tanah ini di bawah kewenangannya. Tapi saya juga punya surat izin usaha dari Disperindag. Saya juga punya surat kekancingan," katanya.

Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Eko Budiyanto, keberatan jika pembongkaran kios-kios PKL tersebut disebut penggusuran. Menurutnya, KAI hanya melakukan penertiban atau penataan di lingkungan lahan KAI. "Kita melakukan penataan, penertiban di rumah kita sendiri, jadi bukan penggusuran," katanya.

Menurutnya, pembongkaran perkiosan tersebut ditujukan untuk kawasan pedestrian, sekaligus menata kawasan stasiun Tugu. "(pembongkaran) berjalan lancar. Kedepan secepatnya kita akan bangun jalur pedestrian menghubungkan ke Malioboro. Jalan Pasar Kembang ini terkenal kumuh, padahal Malioboro sendiri sudah bagus untuk pedestrian," katanya.

Eko menambahkan, Stasiun Tugu itu juga merupakan bagian dari kawasan Malioboro yang saat ini terus ditata. Itu mengapa pihaknya berupaya menata Stasiun

Tugu, terutama di bagian selatan untuk mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.

Bekas kios yang digusur akan dibuat trotoar dengan lebar 5-6 meter yang terbentang dari Simpang Teteg sampai Simpang Empat Ilagran, Pringgokusuman. Trotoar itu terhubung sampai ke kawasan Malioboro. Selain itu suasana stasiun juga dapat terlihat dari jalan.

"Pejalan kaki nanti bisa nyaman dan lalu lintas tidak macet. Kereta api dan stasiun juga nampak," ujar Eko.

Menurut Eko, pedestrian di selatan Stasiun Tugu nanti tidak berbeda dengan pedestrian di Jalan Malioboro. Rencananya, pengerjaan pedestrian di Jalan Pasar Kembang itu rampung pada akhir tahun. "Mudah-mudahan bersamaan dengan rampungnya pembangunan pedestrian di titik nol," ucap Eko.

Eko mengakui tidak ada kompensasi ganti rugi baik dalam wujud cash money ataupun tempat relokasi baru. "Itu juga bukan relokasi, kita hanya menata. Jadi tidak terkait kompensasi," ujarnya.

Namun, Eko juga mengakui sebelumnya saat awal sosialisasi, KAI membuka kemungkinan kompensasi ganti rugi kepada para pedagang. Namun, karena dinilai tidak kooperatif, KAI justru me-

niadakan kompensasi. "Ada kompensasi kalau sejak awal mereka kooperatif," katanya.

Sementara itu Anggota DPRD DIY, Chang Werdianto, menilai seharusnya PT KAI dan pemerintah memikirkan kelanjutan hidup para PKL. "Mereka sudah berjualan berpuluh-puluh tahun di sini. Sekarang diusir begitu saja dan tidak ada pembicaraan nasib mereka. Kasihan mereka orang tidak mampu," ujar Chang.

Ia mendesak PT KAI membuka forum dialog kembali guna memberi kesempatan PKL untuk tetap berjualan di sekitar stasiun Tugu Yogyakarta yang sudah disesuaikan dengan rencana KAI. "Masalahnya jangan sampai habis digusur ini, lahan di sini dibangun kios dan disewakan ke investor," katanya.

Sedangkan pada sore harinya sekitar pukul 16.00, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Purwadi, mendatangi lokasi pembongkaran kios-kios tersebut. Dalam kesempatan itu mereka bertemu dengan Direktur PT KAI Daops 6 Yogyakarta Hendi Helmi. Pasangan kepala daerah yang belum lama dilantik itu berencana memanggil KAI Daops 6 Yogyakarta ke Balaikota, termasuk membahas penataan para pedagang yang kehilangan kiosnya tersebut.

"Setelah ada pembicaraan,

besok (hari ini) Walikota dan Wakil Walikota akan minta keterangan KAI Daops 6 terhadap rencana tindak lanjut paska penataan di sisi selatan

stasiun Tugu. Termasuk penataan eks pedagang di Pasar Kembang," tulis Heroe Purwadi melalui media Whats App. (age/jay)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen 2. Sat Pol PP 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005